ANALISIS PENGARUH PEMINDAHAN IBU KOTA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI KOTA BANJARBARU

Adinda Dewi Sandhya Kinasih
NPP. 33.0768
Program Studi Pembangunan Ekonomi Dan Pemberdayaan Masyarakat
Email: adindasamj2@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Abdurohim, S.Sos, M.Si
Email: abdurohim@ipdn.ac.id

ABSTRACT

Problem Statement (Kesenjangan Penelitian/Research Gap): *The relocation of the capital of South Kalimantan Province from Banjarmasin City to Banjarbaru City represents a strategic government policy aimed at promoting equitable development and improving governance effectiveness. However, despite the increase in economic activities following the relocation, there are indications of a slowdown in economic growth as reflected in the Gross Regional Domestic Product (GRDP). This condition raises questions regarding the extent to which the policy impacts regional economic growth.* ***Purpose****: Therefore, this study aims to analyze the influence and impact of capital relocation on economic growth in Banjarbaru City.* ***Method****: This study employs a quantitative approach using descriptive statistical analysis, Klassen Typology, and hypothesis testing through t-tests and F-tests with the assistance of SPSS software. The data consist of secondary data such as GRDP at constant prices and primary data obtained through questionnaires distributed to respondents. The sampling technique used is purposive sampling based on specific criteria relevant to the research objectives.* ***Result****: The results indicate that the capital relocation has a positive impact on economic activities, investment, and population mobility in Banjarbaru City. However, the rate of economic growth shows a tendency to slow down, although it remains positive overall. Based on Klassen Typology analysis, the economic structure is still dominated by the rapidly growing tertiary sector.* ***Conclusion****: In conclusion, the relocation contributes to economic growth, but further policy reinforcement is needed to optimize and sustain its impact.*
Keywords: *Economic growth, Capital relocation, Banjarbaru City, Regional government policy, Gross Regional Domestic Product (GRDP), Klassen Typology, Bapperida.*

ABSTRAK

Permasalahan (Kesenjangan Penelitian/Research Gap): Pemindahan ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan dari Kota Banjarmasin ke Kota Banjarbaru merupakan kebijakan strategis pemerintah dalam rangka pemerataan pembangunan dan peningkatan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Namun, di tengah meningkatnya aktivitas ekonomi pasca pemindahan, terdapat indikasi perlambatan laju pertumbuhan ekonomi yang tercermin dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana kebijakan tersebut berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. **Tujuan:** Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh serta dampak pemindahan ibu kota terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Banjarbaru. **Metode:** Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis statistik deskriptif, Tipologi Klassen, serta uji hipotesis melalui uji t dan uji F dengan bantuan perangkat lunak SPSS. Data yang digunakan

berupa data sekunder seperti PDRB atas dasar harga konstan. Teknik pengambilan sampel dilakukan secara purposive sampling dengan mempertimbangkan karakteristik tertentu yang relevan dengan penelitian. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemindahan ibu kota memberikan dampak positif terhadap peningkatan aktivitas ekonomi, investasi, dan mobilitas penduduk di Kota Banjarbaru. Namun demikian, laju pertumbuhan ekonomi menunjukkan kecenderungan melambat meskipun tetap berada pada tren positif. Berdasarkan analisis Tipologi Klassen, struktur ekonomi masih didominasi sektor tersier yang berkembang pesat. **Kesimpulan:** Kesimpulannya, pemindahan ibu kota berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, tetapi memerlukan penguatan kebijakan lanjutan agar dampaknya lebih optimal dan berkelanjutan.
Kata kunci: Pertumbuhan Ekonomi, Pemindahan Ibu Kota, Kota Banjarbaru, Kebijakan Pemerintah Daerah, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Tipologi Klassen, Bapperida.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintah memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk mencapai tujuan negara melalui perumusan kebijakan publik, pembangunan daerah, tata kelola pemerintahan, dan pelayanan publik. Secara teoritis, pemerintah memiliki empat fungsi utama, yaitu pengaturan, pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan. Pembangunan ekonomi merupakan proses peningkatan pendapatan per kapita dan kualitas hidup masyarakat dalam jangka panjang melalui pertumbuhan dan perubahan struktur ekonomi. Tujuannya tidak hanya meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB), tetapi juga memperbaiki taraf hidup masyarakat. Pertumbuhan ekonomi diukur melalui peningkatan produksi barang dan jasa yang tercermin dalam PDRB. Menurut teori neo-klasik Solow, pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh akumulasi modal, tenaga kerja, dan kemajuan teknologi, sedangkan teori Harrod-Domar menekankan pentingnya investasi dalam meningkatkan kapasitas produksi dan pendapatan nasional (Shahab, Alwi, & Arini, 2025).

Pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi saling berkaitan. Pembangunan yang terencana, seperti perbaikan infrastruktur dan penciptaan lapangan kerja, dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi. Selain itu, sektor pariwisata berkontribusi terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan pendapatan masyarakat dan aktivitas ekonomi. Pembangunan infrastruktur, pemanfaatan teknologi, dan tenaga kerja berkualitas juga mampu meningkatkan produktivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) yang dicapai melalui peningkatan taraf hidup, perluasan lapangan kerja, dan pemerataan pendapatan. Perencanaan pembangunan menjadi instrumen penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menegaskan bahwa perencanaan pembangunan berperan penting dalam menentukan arah kebijakan pembangunan nasional dan daerah.

Pemindahan ibu kota provinsi merupakan kebijakan strategis yang tidak hanya berkaitan dengan perpindahan pusat pemerintahan, tetapi juga aspek ekonomi, sosial, politik, lingkungan, dan pembangunan wilayah. Kebijakan ini diharapkan mampu menciptakan pemerataan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi baru. Menurut teori pusat pertumbuhan François Perroux, pembentukan pusat pertumbuhan baru dapat menghasilkan efek penyebaran (spread effect) bagi wilayah sekitarnya. Hasil penelitian Yusuf, Roos, Horridge, dan Hartono (2023) menunjukkan bahwa pemindahan pusat pemerintahan dapat mendorong transformasi ekonomi regional melalui peningkatan

aktivitas ekonomi dan pembangunan wilayah baru yang lebih berkelanjutan. Selain itu, desentralisasi politik dapat mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan mengurangi ketimpangan antarwilayah apabila didukung tata kelola yang efektif (Ezcurra & Rodríguez-Pose, 2013).

Pemerataan pembangunan wilayah bertujuan mengurangi ketimpangan ekonomi, sosial, dan infrastruktur antar daerah. Ketimpangan umumnya terjadi karena aktivitas ekonomi, investasi, dan pusat pemerintahan terpusat pada wilayah tertentu sehingga diperlukan penciptaan pusat pertumbuhan baru. Temuan Shankar dan Shah (2003) menunjukkan bahwa kebijakan pembangunan regional yang tepat dapat membantu mengurangi kesenjangan pendapatan antarwilayah dan mendorong pemerataan kesejahteraan masyarakat. Kota Banjarmasin yang sejak 1956 menjadi ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan resmi digantikan oleh Kota Banjarbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022. Pemindahan ibu kota ini merupakan langkah strategis untuk mendukung desentralisasi pembangunan, mengurangi kepadatan penduduk, dan mendorong pemerataan pembangunan ekonomi. Kota Banjarbaru dipilih karena memiliki luas wilayah sekitar 305,153 km² dan potensi pengembangan sebagai pusat pemerintahan maupun pusat perekonomian.

Sejak 2011, pemindahan pusat perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan ke Banjarbaru dilakukan secara bertahap. Pada tahun 2024, jumlah penduduk Banjarbaru mencapai 285.546 jiwa. Pemindahan pusat pemerintahan meningkatkan mobilitas penduduk, investasi, serta aktivitas ekonomi pada sektor perdagangan, jasa, transportasi, dan properti. Namun, peningkatan jumlah penduduk juga berpotensi menimbulkan kemacetan, kenaikan harga tanah, dan kepadatan hunian. Perubahan status Banjarbaru sebagai ibu kota provinsi berdampak pada peningkatan investasi, pembangunan infrastruktur, dan perkembangan sektor jasa serta perdagangan. Pada tahun 2024, nilai PDRB Kota Banjarbaru mencapai Rp14.517,74 miliar dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,71% (BPS, 2025). Struktur ekonomi Banjarbaru didominasi sektor tersier dengan kontribusi rata-rata 73,09% selama 2020–2024, diikuti sektor sekunder 21,76% dan primer 5,15% (PDRB Kota Banjarbaru, 2020–2024).

Fenomena tersebut sejalan dengan teori aglomerasi yang menyatakan bahwa konsentrasi aktivitas ekonomi pada suatu wilayah dapat meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi melalui efisiensi, investasi, serta interaksi antar pelaku ekonomi (Brülhart & Sbergami, 2009). Selain itu, Henderson (2003) menjelaskan bahwa urbanisasi dan pertumbuhan kota umumnya berkorelasi positif dengan pertumbuhan ekonomi karena meningkatnya aktivitas produksi, perdagangan, dan jasa. Meskipun perekonomian Banjarbaru tumbuh positif pasca pemindahan ibu kota, laju pertumbuhan ekonomi menunjukkan perlambatan dari 7,93% pada 2022 menjadi 6,81% pada 2023 dan 6,71% pada 2024. Fenomena ini mengindikasikan adanya faktor penghambat atau ketidakefisienan dalam proses transmisi manfaat ekonomi dari kebijakan pemindahan ibu kota. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menguji apakah kebijakan pemindahan ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Banjarbaru.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (Research Gap)

Berdasarkan penelitian, penulis berfokus pada permasalahan apakah kebijakan pemindahan ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan dari Kota Banjarmasin ke Kota Banjarbaru memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Permasalahan ini muncul karena meskipun setelah pemindahan ibu kota terjadi peningkatan aktivitas ekonomi, investasi, pembangunan infrastruktur, dan mobilitas penduduk di Kota Banjarbaru, laju pertumbuhan ekonomi yang diukur

melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) justru menunjukkan kecenderungan melambat. Data menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kota Banjarbaru yang mencapai 7,93% pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 6,81% pada tahun 2023 dan 6,71% pada tahun 2024. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas kebijakan pemindahan ibu kota sebagai instrumen pemerataan pembangunan dan pendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Kesenjangan penelitian (research gap) yang melatarbelakangi penelitian ini terletak pada masih terbatasnya kajian yang secara khusus menganalisis dampak pemindahan ibu kota provinsi terhadap pertumbuhan ekonomi pada level daerah menggunakan pendekatan kuantitatif berbasis data PDRB. Penelitian-penelitian sebelumnya umumnya membahas pemindahan ibu kota negara (IKN) dan lebih banyak menyoroti dampak positif terhadap pemerataan pembangunan, investasi, maupun pertumbuhan ekonomi secara makro. Selain itu, sebagian besar penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dan belum mengkaji secara spesifik kondisi Kota Banjarbaru sebagai ibu kota baru Provinsi Kalimantan Selatan. Penelitian terdahulu juga belum memasukkan analisis perubahan struktur ekonomi dan dinamika pertumbuhan ekonomi pasca pemindahan ibu kota yang ditandai dengan meningkatnya aktivitas ekonomi namun disertai perlambatan laju pertumbuhan PDRB. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan kajian tersebut dengan menguji secara empiris pengaruh kebijakan pemindahan ibu kota terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Banjarbaru serta memberikan dasar bagi perumusan kebijakan pembangunan ekonomi daerah yang lebih tepat sasaran

1.3. Urgensi Penelitian

Penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan gambaran empiris mengenai pengaruh pemindahan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan dari Kota Banjarmasin ke Kota Banjarbaru terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, mengingat setelah pemindahan ibu kota terjadi peningkatan aktivitas ekonomi, investasi, pembangunan infrastruktur, dan mobilitas penduduk, namun pada saat yang sama laju pertumbuhan ekonomi yang tercermin dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menunjukkan kecenderungan melambat meskipun masih berada pada tren positif. Kondisi tersebut menimbulkan kebutuhan akan kajian yang mampu menjelaskan sejauh mana kebijakan pemindahan ibu kota benar-benar berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi serta faktor-faktor yang memengaruhi efektivitasnya. Apabila penelitian ini tidak dilakukan, maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Pemerintah Kota Banjarbaru akan kekurangan dasar empiris yang kuat dalam mengevaluasi dampak kebijakan pemindahan ibu kota dan merumuskan langkah strategis untuk mengoptimalkan manfaat ekonomi yang dihasilkan. Akibatnya, kebijakan pembangunan, pengelolaan investasi, pengembangan sektor unggulan, serta perencanaan wilayah berisiko tidak tepat sasaran sehingga peluang menjadikan Banjarbaru sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mampu mendorong pemerataan pembangunan di Kalimantan Selatan tidak dapat dimanfaatkan secara optimal.

1.4. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini disusun dengan mengacu pada beberapa penelitian terdahulu yang membahas dampak pemindahan ibu kota, pembangunan wilayah, serta faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah. Berbagai penelitian tersebut menunjukkan adanya perbedaan fokus kajian, metode penelitian, serta objek yang diteliti, namun tetap memiliki relevansi dengan tema pengaruh pemindahan ibu kota terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasibuan (2019) meneliti dampak dan risiko pemindahan ibu kota terhadap perekonomian Indonesia menggunakan metode kualitatif. Penelitian tersebut menemukan bahwa pemindahan ibu kota berpotensi meningkatkan Produk Domestik

Regional Bruto (PDRB), mengurangi kesenjangan ekonomi antarwilayah, serta mendorong pemerataan pembangunan. Fokus penelitian ini berada pada dampak ekonomi dalam skala nasional, terutama terkait pembiayaan, tata ruang, dan risiko politik-ekonomi pembangunan ibu kota baru. Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Nainggolan (2024) yang menjelaskan bahwa aglomerasi ekonomi dan konsentrasi aktivitas pembangunan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah melalui peningkatan produktivitas, investasi, dan keterkaitan antarsektor ekonomi. Dengan demikian, pemindahan ibu kota dapat menjadi instrumen pemerintah dalam menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru yang berdampak pada pemerataan pembangunan wilayah.

Selanjutnya, Aji dkk. (2023) mengkaji dampak pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) terhadap kondisi ekonomi dan sosial di Provinsi Kalimantan Timur dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa relokasi ibu kota memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi, peningkatan peluang kerja, perdagangan, investasi, serta pemerataan pembangunan antara Pulau Jawa dan luar Jawa. Selain aspek ekonomi, penelitian ini juga membahas perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat akibat pembangunan IKN. Hasil tersebut diperkuat oleh penelitian Hutasoit dkk. (2025) yang menemukan bahwa pembangunan IKN menimbulkan perubahan sosial pada masyarakat sekitar, baik dalam bentuk perubahan pola mata pencaharian, peningkatan mobilitas penduduk, maupun munculnya peluang ekonomi baru akibat meningkatnya aktivitas pembangunan dan investasi di wilayah terdampak.

Penelitian yang dilakukan oleh Muamar (2014) membahas perkembangan aktivitas perekonomian pada struktur ruang Kota Palu menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan aktivitas ekonomi kota dipengaruhi oleh sektor industri, perdagangan, jasa, dan permukiman yang didukung oleh ketersediaan lahan yang luas. Temuan tersebut menunjukkan bahwa perubahan fungsi wilayah dan pengembangan pusat kegiatan baru dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Hasil ini memiliki keterkaitan dengan penelitian Primastuti dkk. (2024) yang menjelaskan bahwa daerah penyangga memiliki peran penting dalam mendukung pusat pertumbuhan baru melalui pengembangan potensi ekonomi wilayah, peningkatan konektivitas, serta penguatan sektor unggulan daerah yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan.

Faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah dengan menggunakan metode kuantitatif. Variabel yang diteliti meliputi Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pengeluaran pemerintah, dan inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan ketiga variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, meskipun secara parsial hanya pengeluaran pemerintah yang berpengaruh signifikan. Penelitian ini memberikan gambaran mengenai penggunaan pendekatan kuantitatif dalam menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah. Temuan tersebut juga sejalan dengan penelitian Talluta, Lambelanova, dan Wargadinata (2018) yang menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan SiLPA berpengaruh terhadap belanja modal yang selanjutnya berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah. Selain itu, Sinurat (2024) menemukan bahwa tingkat kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan pengangguran memiliki pengaruh terhadap PDRB daerah, sehingga menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh berbagai indikator sosial dan ekonomi yang saling berkaitan.

Penelitian lainnya dilakukan oleh Pratama (2024) mengenai analisis potensi ekonomi kebijakan infrastruktur dalam pemindahan Ibu Kota Negara. Dengan menggunakan metode kualitatif, penelitian ini menemukan bahwa pemindahan ibu kota memberikan peluang peningkatan investasi, diversifikasi

lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi, serta pemerataan pembangunan. Selain itu, Kalimantan Timur dinilai memiliki keunggulan berupa lokasi yang strategis dan tingkat risiko bencana yang relatif rendah untuk mendukung pembangunan ibu kota baru. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur dan kebijakan relokasi pusat pemerintahan dapat menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi wilayah melalui peningkatan investasi, aktivitas usaha, dan pembangunan sektor-sektor ekonomi produktif.

1.5. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan secara komprehensif oleh penelitian terdahulu. Penelitian ini memiliki kebaruan dari segi objek penelitian, yaitu menganalisis pengaruh pemindahan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Banjarbaru periode 2016–2025. Berbeda dengan penelitian Hasibuan (2019) dan Aji et al. (2023) yang berfokus pada dampak pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) secara makro dan nasional dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini secara spesifik mengkaji pemindahan ibu kota provinsi dalam lingkup regional dan lokal menggunakan pendekatan kuantitatif. Selain itu, berbeda dengan penelitian Muamar (2014) yang menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk meneliti perkembangan aktivitas ekonomi dalam struktur ruang kota, penelitian ini menggunakan analisis statistik deskriptif, Tipologi Klassen, serta uji hipotesis (uji t dan uji F) untuk mengukur pengaruh kebijakan secara empiris. Penelitian Lase (2023) memang menggunakan pendekatan kuantitatif, namun variabel utamanya adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pengeluaran Pemerintah, dan Inflasi, bukan kebijakan pemindahan ibu kota sebagai variabel independen. Sementara itu, penelitian Pratama (2024) membahas pemindahan IKN dalam skala nasional dengan pendekatan kualitatif, berbeda dengan penelitian ini yang berfokus pada pemindahan ibu kota provinsi dengan analisis kuantitatif berbasis data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan dari sisi metode karena mengombinasikan analisis statistik deskriptif, Tipologi Klassen, dan uji hipotesis (uji t dan uji F) dalam satu kajian yang terpadu untuk menganalisis pengaruh kebijakan pemindahan ibu kota provinsi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Selain itu, penelitian ini menggunakan data terbaru periode 2016–2025 sehingga mampu memberikan gambaran empiris yang lebih aktual mengenai dinamika pertumbuhan ekonomi, perubahan kontribusi sektor ekonomi terhadap PDRB, serta klasifikasi sektor-sektor ekonomi unggulan dan tertinggal pasca pemindahan ibu kota di Kota Banjarbaru. Penelitian ini juga mengkaji fenomena perlambatan laju pertumbuhan ekonomi pasca pemindahan ibu kota yang belum menjadi fokus penelitian sebelumnya, sehingga memberikan perspektif baru mengenai efektivitas kebijakan pemindahan ibu kota provinsi sebagai instrumen pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah.

1.6. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pemindahan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Banjarbaru.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode statistik deskriptif, Tipologi Klassen, dan analisis regresi sederhana melalui uji t dan uji F menggunakan bantuan perangkat lunak SPSS. Pendekatan kuantitatif dipilih karena penelitian bertujuan mengukur secara objektif pengaruh kebijakan pemindahan ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Banjarbaru yang direpresentasikan melalui data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Metode statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan perkembangan pertumbuhan ekonomi sebelum dan

sesudah pemindahan ibu kota, sedangkan Tipologi Klassen digunakan untuk mengklasifikasikan kondisi sektor-sektor ekonomi berdasarkan tingkat pertumbuhan dan kontribusinya terhadap PDRB sehingga dapat diketahui sektor yang maju, berkembang, maupun tertinggal. Analisis regresi, uji t, dan uji F digunakan untuk menguji hipotesis mengenai pengaruh kebijakan pemindahan ibu kota terhadap pertumbuhan ekonomi secara statistik (Sugiyono, 2019). Variabel penelitian terdiri atas variabel independen berupa pemindahan ibu kota (X) yang diukur melalui indikator kebijakan, infrastruktur, dan mobilitas penduduk, serta variabel dependen berupa pertumbuhan ekonomi (Y) yang diukur melalui laju pertumbuhan PDRB, PDRB per kapita, dan pertumbuhan sektor ekonomi. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, serta Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kota Banjarbaru.

Penelitian ini tidak menggunakan informan kunci maupun responden wawancara karena berorientasi pada analisis data sekunder deret waktu (time series) mengenai pertumbuhan ekonomi Kota Banjarbaru. Sampel penelitian ditentukan secara purposive sampling, yaitu memilih data yang relevan dengan tujuan penelitian, berupa data PDRB dan indikator ekonomi Kota Banjarbaru pada periode sebelum dan sesudah pemindahan ibu kota. Teknik pengujian data dilakukan melalui pengujian hipotesis menggunakan uji t untuk mengetahui pengaruh parsial variabel pemindahan ibu kota terhadap pertumbuhan ekonomi serta uji F untuk melihat signifikansi model penelitian secara keseluruhan. Selain itu digunakan koefisien determinasi (R^2) untuk mengetahui besarnya kontribusi variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Analisis data dilakukan melalui tahapan pengumpulan data, pengolahan data statistik, analisis deskriptif, analisis Tipologi Klassen, dan pengujian hipotesis. Penelitian dilaksanakan di Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan fokus pada data ekonomi daerah dan dokumen perencanaan pembangunan yang berasal dari BPS dan Bapperida Kota Banjarbaru. Berdasarkan jadwal penelitian skripsi Tahun Akademik 2025/2026, kegiatan penelitian dan pengumpulan data dilaksanakan selama kurang lebih satu bulan, yaitu 5 Januari hingga 25 Januari 2026, yang mencakup pengumpulan data, pengolahan data, analisis hasil penelitian, dan penyusunan laporan skripsi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil Analisis Data

3.1.1 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis ini bertujuan untuk mengetahui dampak pemindahan ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Banjarbaru dengan variabel yang diamati berupa pemindahan ibu kota dan pertumbuhan ekonomi (PDRB) harga konstan sebagai indikator pengukuran. Data yang digunakan adalah tahun 2016–2025. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2022 menjadi titik balik dengan pertumbuhan sebesar 7,39% (tertinggi sepanjang sejarah Kota Banjarbaru), diikuti 6,85% (2023), 6,21% (2024), dan 6,49% (2025).

Tabel 1.

Hasil Pengujian Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
LAJU PERTUMBUHAN	10	-1.83	7.93	5.7170	2.91056
PDRB	10	5102	8282	6535.73	1009.683
Valid N (listwise)	10				

Berdasarkan Tabel 1. hasil analisis deskriptif menggunakan SPSS menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi memiliki nilai rata-rata (mean) sebesar 5,717% selama periode 2016–2026. Nilai minimum sebesar -1,83% terjadi pada tahun 2020 akibat wabah COVID-19, sedangkan nilai maksimum sebesar 7,93% terjadi pada tahun 2022 pasca pandemi yang mendorong peningkatan mobilitas masyarakat melalui Bandar Udara Syamsudin Noor. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kota Banjarbaru mengalami peningkatan setelah pemindahan ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan, meskipun pada tahun-tahun berikutnya mengalami perlambatan pertumbuhan.

Pelambatan pertumbuhan PDRB dipengaruhi oleh menurunnya aktivitas sektor transportasi dan pergudangan yang selama ini menjadi salah satu penyumbang utama perekonomian Kota Banjarbaru. Sektor transportasi memiliki kontribusi besar karena keberadaan Bandar Udara Syamsudin Noor sebagai pusat mobilitas masyarakat dan pemerintahan di Kalimantan Selatan. Pada awal pemindahan ibu kota, aktivitas transportasi udara meningkat akibat tingginya mobilitas ASN, perjalanan dinas, dan koordinasi antarinstansi pemerintah. Beberapa tahun terakhir terjadi pengurangan anggaran pemerintah yang berdampak pada menurunnya intensitas perjalanan dinas ASN. Kebijakan efisiensi anggaran menyebabkan penggunaan transportasi udara melalui Bandara Syamsudin Noor menurun dibandingkan masa awal pemindahan ibu kota. Kondisi ini berdampak langsung pada melambatnya pertumbuhan sektor transportasi dan pergudangan yang sebelumnya menjadi sektor dominan dalam struktur PDRB Kota Banjarbaru.

Kota Banjarbaru sebagai ibu kota baru Provinsi Kalimantan Selatan masih memiliki tingkat ketergantungan yang cukup tinggi terhadap anggaran pemerintah pusat dan provinsi. Pendapatan Asli Daerah (PAD) relatif masih terbatas sehingga kemampuan pembiayaan pembangunan secara mandiri belum optimal. Perekonomian daerah masih ditopang oleh aktivitas pemerintahan, belanja negara, dan pembangunan infrastruktur. Oleh karena itu, pengurangan anggaran pemerintah turut memengaruhi aktivitas ekonomi daerah, terutama sektor jasa, transportasi, dan perdagangan yang berkaitan erat dengan aktivitas pemerintahan.

Dengan demikian, pemindahan ibu kota tetap memberikan dampak positif terhadap perkembangan Kota Banjarbaru melalui peningkatan pembangunan infrastruktur, investasi, serta perkembangan sektor jasa dan perdagangan. Namun, pertumbuhan ekonomi masih sangat dipengaruhi aktivitas pemerintahan dan anggaran negara sehingga diperlukan diversifikasi sektor ekonomi dan peningkatan PAD agar pertumbuhan ekonomi menjadi lebih mandiri dan berkelanjutan.

3.1.2 Analisis Klasifikasi Sektor Ekonomi (Tipologi Klassen)

Analisis Tipologi Klassen dilakukan menggunakan dua indikator utama, yaitu tingkat pertumbuhan ekonomi dan besarnya kontribusi sektor atau PDRB per kapita yang dibandingkan dengan tingkat provinsi. Melalui pendekatan ini, setiap sektor dapat diklasifikasikan berdasarkan pola pertumbuhan dan kontribusinya sehingga dapat diketahui sektor yang termasuk kategori maju dan berkembang pesat, berkembang, potensial, maupun relatif tertinggal. Dengan demikian, Tipologi Klassen memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai posisi dan perkembangan masing-masing sektor dalam struktur perekonomian daerah.

Tabel 2.

Hasil Perhitungan Rata-Rata Tipologi Klassen Kota Banjarbaru Tahun 2016–2026

No	Lapangan Usaha	Provinsi Kalimantan Selatan		Kota Banjarbaru		Kuadran	Keterangan
		Rata-Rata		Rata-Rata			
		Pertumbuhan Sektor(x)	Kontribusi (y)	Pertumbuhan Sektor(Gi)	Kontribusi (Di)		
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,04	13,68	2,98	1,96	IV	Terbelakang
B	Pertambangan dan Penggalian	2,14	24,72	1,53	3,75	IV	Terbelakang
C	Industri Pengolahan	3,91	12,67	4,52	7,60	III	Potensial
D	Pengadaan Listrik dan Gas	6,07	0,13	6,00	0,23	II	Berkembang
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah & Daur Ulang	5,78	0,42	6,49	0,65	I	Maju Unggul
F	Konstruksi	4,61	7,62	5,13	15,03	I	Maju Unggul
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,76	9,19	5,89	10,90	I	Maju Unggul
H	Transportasi dan Pergudangan	6,59	6,34	7,72	20,22	I	Maju Unggul
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,58	2,06	7,00	2,90	I	Maju Unggul
J	Informasi dan Komunikasi	7,44	4,17	7,63	5,99	I	Maju Unggul
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,30	3,23	4,09	1,68	IV	Terbelakang
L	Real Estat	5,68	2,39	6,38	2,47	I	Maju Unggul
M,N	Jasa Perusahaan	6,10	0,62	6,60	0,44	III	Potensial
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,14	5,16	3,49	11,09	I	Maju Unggul
P	Jasa Pendidikan	4,92	4,46	6,15	9,50	I	Maju Unggul
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,60	2,00	8,09	3,60	I	Maju Unggul
R,S,T,U	Jasa Lainnya	5,91	1,15	6,48	1,78	I	Maju Unggul

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2026

Berdasarkan Tabel 2. sektor yang memiliki kontribusi dan pertumbuhan lebih besar dibandingkan rata-rata Provinsi Kalimantan Selatan dikelompokkan ke dalam Kuadran I (maju dan unggul). Sektor tersebut meliputi Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang (kontribusi 0,65; pertumbuhan 6,49), Konstruksi (15,03; 5,13), Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (10,90; 5,89), Transportasi dan Pergudangan (20,22; 7,72), Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (2,90; 7,00), Informasi dan Komunikasi (5,99; 7,63), Real Estat, Administrasi Pemerintahan, Jasa Pendidikan, dan Jasa Kesehatan. Sektor-sektor tersebut tidak hanya memberikan kontribusi besar terhadap struktur ekonomi Kota Banjarbaru, tetapi juga tumbuh lebih cepat dibandingkan rata-rata Provinsi Kalimantan Selatan. Sektor dengan kontribusi relatif tinggi tetapi pertumbuhannya rendah atau sedang dikelompokkan ke dalam Kuadran II (berkembang), yaitu Pengadaan Listrik dan Gas dengan kontribusi 0,23 dan pertumbuhan 6,00. Sektor ini masih memiliki peran strategis, namun pertumbuhannya belum mampu melampaui tingkat pertumbuhan Provinsi Kalimantan Selatan.

Sektor dengan kontribusi tidak terlalu besar tetapi memiliki pertumbuhan cukup tinggi dikelompokkan ke dalam Kuadran III (potensial), yaitu Industri Pengolahan dan Jasa Perusahaan. Kedua sektor ini memiliki kontribusi dan pertumbuhan lebih kecil dibanding sektor Kuadran I, tetapi masih menunjukkan potensi untuk dikembangkan. Sementara itu, sektor dengan kontribusi dan pertumbuhan rendah termasuk dalam Kuadran IV (terbelakang), yaitu Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalian; serta Jasa Keuangan dan Asuransi. Sektor-sektor ini memiliki kontribusi dan pertumbuhan lebih kecil dari rata-rata provinsi sehingga memerlukan intervensi kebijakan untuk meningkatkan perannya dalam perekonomian Kota Banjarbaru.

Gambar 1.

Diagram Analisis Tipologi Klassen Klasifikasi Sektor PDRB ADHK 2010 Kota Banjarbaru Tahun 2016–2026

Kuadran I	**Kuadran II**
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah & Daur Ulang Kontruksi Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Transportasi dan Pergudangan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Informasi dan Komunikasi Real Estat Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib Jasa Pendidikan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	Pengadaan Listrik dan Gas

Jasa Lainnya	
Kuadran III Industri Pengolahan Jasa Perusahaan	**Kuadran IV** Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Pertambangan dan Penggalian Jasa Keuangan dan Asuransi

Berdasarkan Gambar 1. struktur ekonomi Kota Banjarbaru didominasi sektor-sektor Kuadran I yang memiliki kontribusi dan pertumbuhan tinggi, terutama sektor transportasi, perdagangan, konstruksi, serta jasa pemerintahan. Hal ini menunjukkan bahwa pemindahan ibu kota mendorong perkembangan sektor jasa dan aktivitas ekonomi perkotaan.

3.1.3 Uji Hipotesis

Pada bagian ini disajikan hasil analisis regresi linear sederhana untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen berdasarkan data sekunder yang diperoleh. Analisis dilakukan melalui identifikasi variabel dalam model, pengujian kelayakan model, pengujian signifikansi secara simultan, serta pengujian pengaruh secara parsial. Hasil analisis ini memberikan gambaran mengenai hubungan antarvariabel yang diteliti.

Tabel 3.

Variables Entered/Removed

Variables Entered/Removed[a]

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Tahun, Pemindahan[b]	.	Enter

a. Dependent Variable: Pertumbuhan

b. All requested variables entered.

Sumber: Hasil olah peneliti,2026

Berdasarkan Tabel 3. model regresi hanya memasukkan satu variabel independen yaitu Pemindahan Ibu Kota. Metode yang digunakan adalah Enter, artinya seluruh variabel independen dimasukkan secara bersamaan ke dalam model tanpa proses seleksi. Tidak terdapat variabel yang dikeluarkan (removed), sehingga seluruh variabel dianggap relevan untuk dianalisis lebih lanjut. Model regresi yang dibentuk secara langsung menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen tanpa proses eliminasi variabel.

1. Uji Parsial (Uji t)

Tabel 4.

Hasil Uji t

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	4.872	1.168		4.170	.003
	tahun	2.113	1.847	.375	1.144	.286

a. Dependent Variable: pertumbuhan

Berdasarkan Tabel 4. diperoleh nilai konstanta (constant) sebesar 4,872. Nilai koefisien regresi variabel pemindahan ibu kota sebesar 2,113 menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan variabel independen akan meningkatkan variabel dependen sebesar 2,113. Hal ini menunjukkan hubungan positif antara kedua variabel. Namun, variabel pemindahan ibu kota memiliki nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 sehingga secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Banjarbaru.

Hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa pemindahan ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Banjarbaru ditolak, sedangkan hipotesis nol diterima karena hasil pengujian statistik menunjukkan pengaruh yang terjadi belum signifikan secara parsial. Meskipun demikian, secara empiris pemindahan ibu kota tetap memberikan dampak terhadap perkembangan ekonomi daerah, terutama melalui peningkatan pembangunan infrastruktur, aktivitas perdagangan, jasa, dan mobilitas penduduk. Namun pengaruh tersebut belum sepenuhnya stabil dan merata dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Kota Banjarbaru dalam jangka pendek.

2. Uji Koefisien Determinasi (R)

Tabel 5.

Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.375[a]	.141	.033	2.86189

a. Predictors: (Constant), tahun

b. Dependent Variable: pertumbuhan

Berdasarkan Tabel 5. diperoleh nilai koefisien korelasi (R) sebesar 0,375 yang menunjukkan adanya hubungan positif dan cukup erat antara variabel independen dengan variabel dependen. Semakin tinggi nilai R, semakin kuat hubungan yang terjadi antara variabel dalam model regresi. Nilai R Square sebesar 0,141 menunjukkan bahwa sebesar 14,1% variasi pada variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam model. Nilai Adjusted R Square sebesar 0,033 menunjukkan bahwa setelah disesuaikan dengan jumlah variabel dan sampel, model masih memiliki kemampuan menjelaskan variabel dependen meskipun relatif rendah. Adapun nilai Std. Error of the Estimate sebesar 2,86189 menunjukkan tingkat kesalahan prediksi model yang relatif kecil.

3.2 Pembahasan

Bagian ini menjelaskan alasan ditolaknya hipotesis penelitian melalui interpretasi akademis dengan membandingkan kondisi nyata di Kota Banjarbaru berdasarkan analisis statistik deskriptif PDRB, Tipologi Klassen, dan hasil uji hipotesis.

3.2.1 Pengaruh Pemindahan Ibu Kota terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Banjarbaru

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa pemindahan ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan berpengaruh positif tetapi belum signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Banjarbaru. Hasil uji t memperoleh nilai t hitung 1,144 dengan signifikansi 0,285 (>0,05), sehingga H0 diterima dan H1 ditolak. Nilai koefisien determinasi (R Square) sebesar 0,141 menunjukkan bahwa pemindahan ibu kota menjelaskan 14,1% variasi pertumbuhan ekonomi Kota Banjarbaru, sedangkan 85,9% sisanya dipengaruhi faktor lain seperti investasi, inflasi, kondisi ekonomi nasional, dan kebijakan pemerintah pusat.

Berdasarkan data PDRB tahun 2016–2025, rata-rata pertumbuhan ekonomi meningkat dari 4,23% pada periode sebelum pemindahan (2016–2021) menjadi 6,17% pada periode sesudah pemindahan (2022–2025). Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2022 sebesar 7,93%, dipengaruhi pemulihan ekonomi pasca COVID-19 dan awal implementasi pemindahan ibu kota. Selanjutnya terjadi perlambatan menjadi 6,81% (2023), 6,71% (2024), dan 6,49% (2025). Perlambatan ini mencerminkan penyesuaian ekonomi pasca lonjakan awal serta dampak kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat yang mengurangi perjalanan dinas ASN melalui Bandara Syamsudin Noor.

Temuan ini sejalan dengan teori pusat pertumbuhan (growth pole theory) François Perroux yang menyatakan bahwa pusat pertumbuhan baru dapat mendorong aktivitas ekonomi wilayah sekitarnya

melalui spread effect. Pemindahan ibu kota telah menciptakan pusat pertumbuhan baru melalui peningkatan infrastruktur, investasi, mobilitas penduduk, serta perkembangan sektor perdagangan dan jasa. Namun, ketidaksignifikanan statistik menunjukkan bahwa dampaknya masih berada pada tahap awal sehingga memerlukan periode pengamatan yang lebih panjang.

3.2.2 Dampak Pemindahan Ibu Kota Berdasarkan Indikator PDRB dan Mobilitas Penduduk

a. Peningkatan Nilai PDRB

Nilai PDRB ADHK Kota Banjarbaru terus meningkat dari Rp7,05 triliun pada tahun 2021 menjadi Rp7,61 triliun (2022), Rp7,78 triliun (2023), Rp8,30 triliun (2024), dan Rp8,84 triliun (2025). Kenaikan ini menunjukkan bertambahnya output ekonomi riil pasca pemindahan ibu kota. Rata-rata pertumbuhan ekonomi periode 2022–2025 mencapai 6,98% per tahun, lebih tinggi dibandingkan rata-rata 4,23% pada periode 2016–2021.

b. Mobilitas Penduduk

Laju pertumbuhan penduduk Kota Banjarbaru pada periode 2020–2025 mencapai 3,43% per tahun dengan jumlah penduduk tahun 2025 sebanyak 293.332 jiwa. Peningkatan ini terutama dipicu migrasi ASN beserta keluarganya dari Banjarmasin dan daerah lain. Mobilitas tersebut meningkatkan permintaan perumahan, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan sehari-hari sehingga mendorong sektor perdagangan, jasa, dan konstruksi. Kecamatan Landasan Ulin mencatat pertumbuhan penduduk tertinggi sebesar 3,75% dan menjadi lokasi pusat perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

c. Perkembangan Sektor Transportasi dan Pergudangan

Sektor Transportasi dan Pergudangan merupakan kontributor terbesar PDRB Kota Banjarbaru dengan rata-rata kontribusi 29,72% selama 2016–2025. Pertumbuhan sektor ini mencapai 26,24% pada tahun 2022 akibat meningkatnya mobilitas pasca pemindahan ibu kota. Namun, pertumbuhannya melambat menjadi 17,51% (2023), 8,08% (2024), dan 4,76% (2025), sejalan dengan kebijakan efisiensi anggaran pemerintah yang mengurangi perjalanan dinas ASN. Hal ini menunjukkan tingginya ketergantungan sektor transportasi terhadap aktivitas pemerintahan.

d. Perkembangan Sektor Konstruksi dan Perdagangan

Sektor Konstruksi berkontribusi 13,36% terhadap PDRB dengan pertumbuhan stabil sebesar 7,02% pada 2024 dan 7,26% pada 2025. Kondisi ini mencerminkan tingginya pembangunan gedung pemerintahan, infrastruktur jalan, fasilitas publik, dan perumahan pasca pemindahan ibu kota. Sementara itu, sektor Perdagangan Besar dan Eceran berkontribusi 10,77% terhadap PDRB dengan pertumbuhan meningkat dari 5,42% (2023) menjadi 6,11% (2024) dan 9,15% (2025), menunjukkan meningkatnya aktivitas perdagangan akibat pertambahan penduduk dan daya beli masyarakat.

3.2.3 Analisis Struktur Ekonomi Berdasarkan Tipologi Klassen

Hasil analisis Tipologi Klassen menunjukkan bahwa struktur ekonomi Kota Banjarbaru masih didominasi sektor tersier yang berkembang pesat. Sektor Kuadran I (maju dan tumbuh cepat) meliputi Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Konstruksi; Perdagangan Besar dan Eceran; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; Real Estat; Administrasi Pemerintahan; Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan; serta Jasa Lainnya.

Dominasi sektor tersier mencerminkan transformasi ekonomi Banjarbaru dari sektor primer dan sekunder menuju ekonomi berbasis jasa dan perdagangan. Kondisi ini sesuai dengan fungsi Banjarbaru sebagai pusat pemerintahan dan pusat pertumbuhan baru. Sektor Transportasi dan Pergudangan sebagai kontributor terbesar (29,72%) menunjukkan peran strategis Bandara Syamsudin Noor sebagai gerbang utama Kalimantan Selatan. Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib dengan kontribusi 10,07% juga menunjukkan besarnya peran pemerintah dalam perekonomian daerah.

Sektor Kuadran II (maju namun tertekan) hanya mencakup Pengadaan Listrik dan Gas. Sektor ini memiliki kontribusi stabil sebesar 0,23%, namun pertumbuhannya (rata-rata 6,00%) masih di bawah rata-rata provinsi. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas dan perluasan layanan kelistrikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan industri.

Sektor Kuadran III (potensial) meliputi Industri Pengolahan dan Jasa Perusahaan. Kedua sektor memiliki pertumbuhan di atas rata-rata provinsi meskipun kontribusinya masih kecil terhadap PDRB, yaitu 6,34% dan 0,44%. Industri Pengolahan tumbuh dari 4,72% (2024) menjadi 8,64% (2025), menunjukkan pergeseran ekonomi ke arah yang lebih produktif. Oleh karena itu, diperlukan dukungan kebijakan industrialisasi, pengembangan UMKM, dan kemudahan investasi. Sektor Kuadran IV (tertinggal) meliputi Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalian; serta Jasa Keuangan dan Asuransi. Ketiga sektor memiliki kontribusi dan pertumbuhan rendah dibandingkan rata-rata provinsi. Sektor Pertambangan dan Penggalian mengalami pertumbuhan negatif pada 2023 (-1,66%), 2024 (-7,1%), dan 2025 (-3,79%) karena keterbatasan potensi tambang di Banjarbaru. Sektor pertanian juga tumbuh lambat akibat konversi lahan menjadi permukiman dan perkantoran. Kondisi ini menunjukkan bahwa Banjarbaru tidak memiliki keunggulan komparatif pada sektor primer sehingga pembangunan ekonomi perlu difokuskan pada sektor tersier dan sektor sekunder yang potensial.

3.2.4 Peran Pemerintah dalam Optimalisasi Dampak Pemindahan Ibu Kota

Berdasarkan teori Noor dkk. (2025), pemerintah memiliki peran penting dalam pembangunan daerah melalui desentralisasi dan pemerataan pembangunan. Dalam pemindahan ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan, terdapat empat fungsi utama pemerintah yang perlu dioptimalkan:

a. Fungsi Pembangunan

Pemerintah Kota Banjarbaru melalui Bapperida telah menjalankan fungsi pembangunan melalui perencanaan jangka panjang dan menengah yang selaras dengan kebijakan pemindahan ibu kota. Visi "Banjarbaru EMAS" (Elok, Maju, Adil, dan Sejahtera) menjadi dasar pembangunan daerah. Pembangunan jalan, jembatan, gedung perkantoran, dan fasilitas publik terus dilakukan untuk mendukung aktivitas pemerintahan dan ekonomi. Namun, hasil Tipologi Klassen menunjukkan pembangunan belum merata, terutama pada sektor tertinggal seperti pertanian dan jasa keuangan.

b. Fungsi Pertumbuhan

Pemerintah daerah mendorong pertumbuhan ekonomi melalui investasi dan pengembangan sektor usaha. Peningkatan investasi pasca pemindahan ibu kota menunjukkan keberhasilan fungsi ini. Sektor transportasi, perdagangan, konstruksi, dan jasa tumbuh positif. Namun, diperlukan diversifikasi ekonomi agar pertumbuhan tidak hanya bergantung pada aktivitas pemerintahan. Pengembangan Industri Pengolahan sebagai sektor potensial (Kuadran III) perlu diprioritaskan karena mampu menciptakan nilai tambah dan lapangan kerja.

c. Fungsi Pengaturan

Fungsi pengaturan tercermin melalui kebijakan tata ruang dan perizinan investasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pemerintah daerah berwenang mengelola tata ruang wilayah. Fungsi ini penting untuk mengendalikan dampak urbanisasi seperti kemacetan dan kenaikan harga tanah. Data menunjukkan harga tanah di sekitar kawasan perkantoran pemerintah dan Bandara Syamsudin Noor meningkat 200–300% dalam lima tahun terakhir, sehingga memerlukan pengelolaan yang baik untuk mencegah gejolak sosial ekonomi.

d. Fungsi Pemberdayaan

Fungsi pemberdayaan bertujuan agar masyarakat lokal turut merasakan manfaat ekonomi dari pemindahan ibu kota. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Banjarbaru masih sebesar 4,75%, dengan pencari kerja terbanyak berasal dari lulusan SMA (567 orang) dan sarjana (142

orang). Hal ini menunjukkan bahwa penyerapan tenaga kerja belum optimal. Oleh karena itu, pengembangan UMKM, pelatihan kerja berbasis kompetensi, peningkatan pendidikan vokasi, serta kemitraan antara pemerintah, swasta, dan masyarakat perlu diperkuat untuk menciptakan ekonomi yang lebih inklusif.

3.3 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Temuan utama penelitian ini menunjukkan bahwa pemindahan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan dari Kota Banjarmasin ke Kota Banjarbaru memberikan dampak positif terhadap peningkatan aktivitas ekonomi, investasi, pembangunan infrastruktur, serta mobilitas penduduk. Namun demikian, berdasarkan hasil uji hipotesis, pengaruh pemindahan ibu kota terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Banjarbaru belum signifikan secara statistik. Hasil uji t menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,105 (>0,05) dan nilai koefisien determinasi (R Square) sebesar 0,488, yang berarti pemindahan ibu kota hanya mampu menjelaskan 48,8% variasi pertumbuhan ekonomi, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian. Selain itu, analisis Tipologi Klassen menunjukkan bahwa struktur perekonomian Kota Banjarbaru masih didominasi sektor tersier seperti transportasi dan pergudangan, konstruksi, perdagangan, serta administrasi pemerintahan yang tergolong sektor maju dan tumbuh cepat. Sama halnya dengan temuan Hasibuan (2019), Aji et al. (2023), dan Pratama (2024) yang menyatakan bahwa pemindahan pusat pemerintahan mampu meningkatkan aktivitas ekonomi, investasi, peluang usaha, dan pemerataan pembangunan wilayah. Temuan penelitian ini memperkuat penelitian sebelumnya bahwa pemindahan pusat pemerintahan dapat menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru melalui peningkatan pembangunan infrastruktur dan aktivitas ekonomi masyarakat.

Di sisi lain, penelitian ini menemukan bahwa meskipun aktivitas ekonomi meningkat, laju pertumbuhan ekonomi Kota Banjarbaru menunjukkan kecenderungan melambat setelah pemindahan ibu kota, sehingga pengaruhnya belum signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dalam jangka pendek. Temuan ini berbeda dengan penelitian Hasibuan (2019) dan Aji et al. (2023) yang menyimpulkan bahwa pemindahan ibu kota memberikan pengaruh signifikan terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan. Perbedaan tersebut diduga disebabkan oleh karakteristik objek penelitian yang berbeda, dimana penelitian sebelumnya mengkaji pemindahan ibu kota negara dalam skala nasional, sedangkan penelitian ini berfokus pada pemindahan ibu kota provinsi dalam lingkup regional Kota Banjarbaru. Selain itu, manfaat ekonomi dari kebijakan pemindahan ibu kota memerlukan waktu yang relatif panjang agar dapat tertransmisikan secara optimal ke seluruh sektor ekonomi. Temuan ini juga memperkuat pendapat Muamar (2014) bahwa perkembangan ekonomi wilayah tidak hanya ditentukan oleh perubahan fungsi pusat pemerintahan, tetapi juga dipengaruhi oleh ketersediaan lahan, struktur ekonomi daerah, kapasitas investasi, serta kemampuan sektor-sektor ekonomi dalam menyerap dampak pembangunan secara berkelanjutan.

Fenomena perlambatan pertumbuhan ekonomi pasca pemindahan ibu kota yang ditemukan dalam penelitian ini dari 7,93% pada tahun 2022 menjadi 6,71% pada tahun 2024 juga tidak banyak dibahas dalam penelitian sebelumnya, yang umumnya hanya menyoroti sisi positif tanpa mengkaji dinamika perlambatan yang terjadi akibat kebijakan efisiensi anggaran pemerintah dan ketergantungan sektor transportasi terhadap aktivitas pemerintahan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pemindahan ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan berhasil menciptakan pusat pertumbuhan baru dan mendorong dinamika ekonomi lokal, efektivitasnya sebagai instrumen pertumbuhan ekonomi daerah masih

memerlukan penguatan kebijakan lanjutan, diversifikasi sektor ekonomi, dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar dampaknya menjadi lebih optimal, merata, dan berkelanjutan dalam jangka panjang, sehingga penelitian ini memberikan kontribusi kebaruan ilmiah dengan mengisi celah kajian tentang pemindahan ibu kota provinsi yang selama ini terabaikan dalam literatur akademik.Dengan demikian, pemindahan ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan dapat dikatakan berhasil mendorong dinamika ekonomi lokal, namun masih memerlukan kebijakan lanjutan untuk mengoptimalkan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Banjarbaru secara lebih signifikan.

3.4 Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan bahwa pemindahan ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan ke Kota Banjarbaru menjadi faktor pendukung meningkatnya aktivitas ekonomi melalui bertambahnya investasi, pembangunan infrastruktur, serta meningkatnya mobilitas penduduk yang mendorong perkembangan sektor perdagangan, jasa, transportasi, dan konstruksi. Namun demikian, terdapat faktor penghambat yang menyebabkan dampak tersebut belum optimal terhadap pertumbuhan ekonomi, yaitu perlambatan aktivitas pada sektor transportasi dan pergudangan, ketergantungan ekonomi pada sektor tersier, serta adanya kebijakan efisiensi anggaran pemerintah yang mengurangi intensitas perjalanan dinas ASN. Kondisi ini mengakibatkan pengaruh pemindahan ibu kota terhadap pertumbuhan ekonomi masih positif tetapi belum signifikan secara statistik dan belum merata pada seluruh sektor ekonomi di Kota Banjarbaru

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa kebijakan pemindahan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan dari Kota Banjarmasin ke Kota Banjarbaru memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Banjarbaru yang ditunjukkan oleh meningkatnya rata-rata pertumbuhan ekonomi, berkembangnya aktivitas ekonomi, investasi, infrastruktur, serta mobilitas penduduk. Namun, berdasarkan hasil uji statistik, pengaruh pemindahan ibu kota terhadap pertumbuhan ekonomi belum signifikan secara statistik, meskipun mampu menjelaskan sebagian variasi pertumbuhan ekonomi daerah. Struktur perekonomian Kota Banjarbaru didominasi oleh sektor tersier yang tergolong maju dan tumbuh cepat, sementara beberapa sektor lainnya masih memerlukan perhatian dan intervensi kebijakan. Dengan demikian, tujuan penelitian untuk menganalisis pengaruh pemindahan ibu kota terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Banjarbaru menunjukkan bahwa kebijakan tersebut berkontribusi positif terhadap perkembangan ekonomi daerah, namun belum memberikan pengaruh yang signifikan secara statistik terhadap pertumbuhan ekonomi.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya berfokus pada Kota Banjarbaru sebagai lokasi penelitian dan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder berupa PDRB periode 2016–2025. Selain itu, variabel yang dianalisis hanya berfokus pada pengaruh pemindahan ibu kota terhadap pertumbuhan ekonomi, sehingga belum mencakup faktor lain seperti investasi, inflasi, dan kebijakan pemerintah yang juga memengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah.

Arah Masa Depan Penelitian (*Future Work*). Peneliti menyarankan agar penelitian selanjutnya dilakukan pada wilayah lain di Kalimantan Selatan atau membandingkan beberapa daerah terdampak pemindahan ibu kota. Penelitian berikutnya juga dapat menambahkan variabel seperti investasi,

kesempatan kerja, inflasi, dan kesejahteraan masyarakat agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai dampak pemindahan ibu kota terhadap pembangunan ekonomi daerah.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Pemerintah Kota Banjarbaru, serta Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Kota Banjarbaru yang telah memberikan dukungan dan kesempatan dalam pelaksanaan penelitian ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada dosen pembimbing, keluarga, serta seluruh pihak yang telah membantu dan mendukung hingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Aji, G., Arfani, Z., Sari, A. M., & Seprtiani, R. (2023). Dampak Pemindahan Ibukota Negara Baru terhadap Ekonomi dan Sosial di Provinsi Kalimantan Timur. Jurnal Ilmu Hukum, 1(5), 2985–5624. http://jurnal.kolibi.org/index.php/kultura

Brülhart, M., & Sbergami, F. (2009). Agglomeration and growth: Cross-country evidence. Journal of Urban Economics, 65(1), 48–63. https://doi.org/10.1016/j.jue.2008.08.003

Ezcurra, R., & Rodríguez-Pose, A. (2013). Political decentralization, economic growth and regional disparities in the OECD. Regional Studies, 47(3), 388–401. https://doi.org/10.1080/00343404.2012.731046

Hasibuan, R. R. A. (2019). Dampak Dan Resiko Perpindahan Ibu Kota Terhadap Ekonomi Di Indonesia. AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam, 53(9), 1689–1699.

Henderson, J. V. (2003). The urbanization process and economic growth: The so-what question. Journal of Economic Growth, 8(1), 47–71. https://doi.org/10.1023/A:1022860800744

Hutasoit, I., Handayani, N., Risnawati, A., Ilham, M., Stenly, & Walker, S. (2025). Dampak perubahan sosial pasca pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan. Jurnal Ilmu Wahana Bhakti Praja (JIWBP). Institut Pemerintahan Dalam Negeri. https://ejournal.ipdn.ac.id/JIWBP/article/view/5118

Muamar, A. (2014). Pada Struktur Ruang Pusat Kota Palu. 194–205.

Nainggolan, R. R. E. (2024). Aglomerasi dan pertumbuhan ekonomi wilayah: Studi kasus Provinsi Jawa Barat. J-3P (Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan), 9(2), 230–251. https://ejournal.ipdn.ac.id/JPDPP/article/view/4210

Pratama, N. R. (2024). Analisis Potensi Ekonomi Kebijakan Infrastruktur: Pemindahan Ibu Kota Negara. ResearchGate, January, 1–23. https://www.researchgate.net/publication/377146250_ANALISIS_POTENSI_EKONOMI_KEBIJAKAN_INFRASTRUKTUR_PEMINDAHAN_IBU_KOTA_NEGARA

Primastuti, A., Yahya, A. S., Aini, A. N., Almaarif, A., & Jeddawi, M. (2024). Analisis potensi ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan dan Kota Parepare sebagai daerah penyangga Ibu Kota Nusantara. Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja (JIPWP). Institut Pemerintahan Dalam Negeri. https://ejournal.ipdn.ac.id/JIPWP/article/view/4077

Shankar, R., & Shah, A. (2003). Bridging the economic divide within countries: A scorecard on the performance of regional policies in reducing regional income disparities. World Development, 31(8), 1421–1441. Elsevier. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0305750X03000986

Sinurat, R. P. P. (2024). Pengaruh kemiskinan, IPM, dan pengangguran terhadap PDRB Provinsi Nusa Tenggara Barat. JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik), 11(2), 130–143. Institut Pemerintahan Dalam Negeri. https://ejournal.ipdn.ac.id/JEKP/article/view/4722

Sugiyono. (2023). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta. (di teks tersitasi sebagai Sugiyono, 2019, kemungkinan ada ketidaksesuaian tahun)

Talluta, D. L., Lambelanova, R., & Wargadinata, E. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan SiLPA terhadap Belanja Modal dan dampaknya kepada pertumbuhan ekonomi Pemerintah Daerah Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jurnal Ilmu Wahana Bhakti Praja, 8(1). https://ejournal.ipdn.ac.id/index.php/JIWBP/article/view/282

Yusuf, A. A., Roos, E. L., Horridge, J. M., & Hartono, D. (2023). Indonesian capital city relocation and regional economy's transition toward less carbon-intensive economy: An inter-regional CGE analysis. Japan and the World Economy, 68, 101212. https://doi.org/10.1016/j.japwor.2023.101212

Perroux, F. (1955). Note sur la notion de pôle de croissance. Économie Appliquée, 8, 307–320. (disebut sebagai teori François Perroux/Growth Pole Theory)